

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. UII Press.
- Ali Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana 2008.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Budiono, Harlien, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Charlie Rudyat. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pustaka Mahardika.
- Darwan prinst, 2002, strategi menyusun dan menangani guhatan persata, citra aditya bakti, bandung, hlm. 157.
- Efendi Masyhur. 1994. *Dimensi/Dinmika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum : Norma -Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta. Kanisivs.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta. Erlangga.
- Habib Adjie.2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Reflika Aditama.
- , 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama.
- , 2008. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Surabaya. Citra Adtya Bakti.
- . 2005. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung. PT Refika Aditama.
- HS.Salim. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan MInuta Akta)*, Cet 2. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- Kartini Muljadi. 2006. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta. Kencana.
- Liliana Tedjosaputro, 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang.
- M Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Munir Faudi. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Meida.
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. PT Bina Ilmu Surabaya.
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung. Citra Aditya.
- R. Wirjono Prodjodikiro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung. Mandar Maju.
- R Soegondo. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. PT Pradnya Paramita.
- Riduan Syahrani. 2013. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Safa'at, Jimly Asshiddiqie dan M Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.
- . 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Grasindo.
- Sjaifurrachman dan Habib adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung. Mandar Maju.
- Soetarjo Soemoatmodjo. 1986. *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*. Yogyakarta. Liberty.
- Subekti. 2010. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang*

Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.
Jakarta. Institut Bankir Indonesia.

JURNAL

Andi Mamminanga. 2008. 'Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN'. Universitas Gajah Mada.

Arum kurnia sari, 2021, "Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Akibat Kelalaian Notaris di Kota Semarang", Magister Kenotariatan, Semarang.

Arif Hidayat. 2019. 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti yang Aktanya Bermasalah Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris', *Jurnal Minuta*.

Bahder Johan Nasution.2020. 'Penerapan Sanksi Adminitratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris', *Recital Review*. Vol.2. Universitas Jambi.

Dedy Pramono. 2015. Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*.

Erlan Ardiansyah, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, 2022, Batasan Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya, *Recital Review*.

Erwinsyabhana, Tengku Melinda. 2018. 'Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir', *Lentera Hukum*, 5.2.

Harnum, Estikharisma, and Akhmad Khisni. 2017. 'Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris dan Notaris Pengganti'.

Kunni Afifah, Kunni. 2017. 'Tanggung Jawab dan Perlindungan', *Lex Renaissance*, 2 .

Kartini Siahaan, 2019 'Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana', *Recital Review*.

Lina Jamilah, 2012, 'Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku', *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*.

- Lely, Analis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Mneyimpan Minuta Akta, *Jurnal Hukum*, Fakultas Kenotarian Universitas Brawijaya, Malang,
- Luh Nila Winarni. 2015. 'Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan', *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Makmur, and Taufik Siregar. 2013. 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris', *Jurnal Mercatoria*.
- Saida Flora, Henny. 2012. 'Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta', *Lentera Hukum*.
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, and A.A. Andi Prajitno. 2018. 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya', *Perspektif*.
- Wiriya Adhy Utama, and Ghansham. 2018. 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam', *Jurnal Panorama Hukum*.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara